



Surabaya, 6 April 2022

SEMINAR NASIONAL HASIL RISET DAN PENGABDIAN

"Menuju Indonesia Bangkit dan Tangguh melalui Riset dan Pengabdian berbasis Teknologi"



Persepsi Masyarakat Desa Kureksari Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Di Kecamatan Waru Sidoarjo

Muhamad Aji Nugroho*, Dwi Retnani Srinarwati, Bernadetta Budi Lestari

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

*Email: Ajik.muhamad24@gmail.com

Abstract

Merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin meningkat memaksa pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tegas dan tegas yaitu kebijakan PPKM Darurat yaitu aturan dengan pembatasan kegiatan masyarakat luas. Pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya di lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan implementasi aturan PPKM Pemerintah Kecamatan Waru di masyarakat, mendeskripsikan implementasi aturan PPKM Darurat Masyarakat Waru, mengungkapkan persepsi masyarakat Desa Kureksari terhadap kebijakan PPKM Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo . Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Kureksari menanggapi berbagai tanggapan yaitu sebagian besar setuju dan sebagian tidak setuju karena dampaknya mengakibatkan kegiatan terhambat, pendapatan menurun, pembelajaran kurang efektif.

Keywords : perception, public, emergency PPKM

Copyright © (2022) Seminar Hasil Riset dan Pengabdian ke 4

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 atau yang disebut dengan Corona Virus Disease 2019 adalah wabah yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019(Who,2020). Awal bulan Januari 2020 wabah virus mematikan ini telah menyebar diberbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Akhir Januari 2020, semakin banyak negara di dunia melaporkan temuan kasus infeksi Covid-19 (Harahap,202). WHO akhirnya menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau Public Health Emergency of Internasional Concern pada 30 Januari 2020 karena penyebaran antarnegara yang begitu tinggi. Pada Bulan April-Mei 2020 Pemerintah Pusat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung Raya, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain untuk mengurangi kerumunan dan mobilitas masyarakat yang berpotensi menularkan virus. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan hubungan kekerabatan dan solidaritas manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling tolong-menolong lambat laun terkikis dalam pola kehidupan baru yang memaksa pergeseran nilai, pola pikir dan tingkah laku kehidupan masyarakat.

Kepala daerah dihimbau untuk melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, secara berkala, harian, mingguan dan bulanan, untuk melakukan pembatasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi (Pujaningsih,2020). Kebijakan ini dievaluasi dan dioptimalkan sampai mengalami perpanjangan sampai 05 April 2021 yang tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 (Karniawan,2021). Daerah yang sudah ditetapkan oleh Provinsi untuk kegiatan PPKM Mikro dapat mengatur daerahnya sendiri berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran (Covid-19). Pada bulan Juli pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi yaitu PPKM Darurat, yang diatur dalam Instruksi MENDAGRI nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku pada 3-20 Juli 2021. Langkah ini juga disertai dengan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat (targeted testing) untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat (Nurfurqo,2020). Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membahas topik dan melakukan sebuah penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Kureksari terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo".

METODE

Pendekatan penelitian

Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Kureksari terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo” menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini, mencari data secara tertulis, lisan, serta pengamatan Persepsi Masyarakat Desa Kureksari terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo.

Data dan Sumber Data

Data merupakan fakta atau informasi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian sebelumnya (Sugiono 2017). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan peneliti maka data yang dihimpun meliputi: Jenis sumber data dalam penelitian ini meliputi: 1) peserta didik; 2) pekerja; 3) dan sosial kemasyarakatan. 4) data pendukung yang berhubungan dengan situasi dan kondisi Kecamatan Waru Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data sehingga mampu mencari data dengan teknik pengumpulan data yang terstruktur (Sugiono : 224). Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber primer, serta teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Penelitian ini Analisis dalam penelitian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam (in depth interview), observasi langsung terhadap subjek penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut diharapkan peneliti dapat memaparkan secara jelas dan sistematis tentang Persepsi Masyarakat Desa Kureksari terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu. Dimana dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Desa Kureksari meliputi peserta didik, pekerja, dan sosial kemasyarakatan tentang implementasi aturan PPKM, melaksanakan aturan PPKM dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan PPKM. Peneliti melakukan teknik ini dengan cara menggali dan mengecek atau memeriksa informasi dengan

membandingkan data yang diperoleh dari sumber-sumber informan berupa tanggapan masyarakat melalui kombinasi dari teknik wawancara, observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kureksari merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang terletak 1,2 km ke arah Timur dari Kecamatan Waru, lokasi alamat Desa di Jalan. Flamboyan No.55 Kureksari, Kecamatan Waru. Desa Kureksari mempunyai luas wilayah seluas 121.749 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Kureksari :

- Sebelah Utara : Batasan Desa Janti dan Kedungrejo
- Sebelah Selatan : Batasan dengan Desa Sawotratap
- Sebelah Timur : Batasan dengan Desa Ngingas
- Sebelah Barat : Batasan dengan Desa Waru

2. Data Penduduk Desa Kureksari

Berdasarkan Laporan Tripikat Desa Kureksari pada tahun 2021 Jumlah penduduk Desa Kureksari sebesar 14.818 jiwa yang terdiri dari 7.274 jiwa Laki-laki dan 7.544 jiwa perempuan Gambaran Umum Sumber Daya Manusia. Data kependudukan Desa Kureksari menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Kureksari berada pada rentang usia produktif yang mana bisa diartikan sebagai sebuah potensi sumber daya manusia yang tinggi. Selain itu, Desa Kureksari memiliki jenjang pendidikan yang lengkap mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), baik yang diselenggarakan oleh Negara (sekolah negeri) maupun milik swasta.

Pembahasan

Pemerintah Kecamatan Waru mengimplementasikan aturan PPKM di masyarakat

Dari awal tahun 2020 sampai sekarang ini, penyebaran Covid-19 semakin meningkat. Adanya fenomena pandemi merupakan masalah besar bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Waru, musibah yang pertama kali melanda di Indonesia memaksa pemerintah membuat kebijakan baru tentang PPKM Darurat yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan diberlakukan kebijakan aturan yang lebih ketat. Maka pemerintah mengimplementasikan aturan PPKM di masyarakat dengan memberi arahan yang sesuai dengan edaran tersebut. sosialisasi masyarakat harus dilaksanakan terutama di tempat yang mengundang kerumunan supaya lebih waspada bahanya wabah Covid-19.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa perangkat Desa Kureksari. Bapak Whisom (54) selaku Kepala Desa Kureksari menyatakan bahwa:

“Kita sosialisasi pada masyarakat baik di warkop, di masjid, perkumpulan-perkumpulan maupun organisasi masyarakat. Bahwasannya pemdes terkait dengan Covid-19 ini kita edarkan kembali sehingga ada rambu-rambu pada masyarakat agar lebih hati-hati untuk terkait masalah bergerombol, jaga jarak, pakai masker.”

Terkait pernyataan dari perangkat desa tentang implementasi aturan PPKM, setuju dan mendukung program dari pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat akan kesadaran diri untuk kesehatan masing-masing.

Masyarakat Waru melaksanakan aturan PPKM Darurat

Di Indonesia sendiri, masyarakat sudah melaksanakan aturan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pada kebijakan aturan yang sebelumnya. Pandangan masyarakat mengenai protokol kesehatan memang baik sebagai alat pelindung diri, terutama masker (Nawang Sari dkk, 2021)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat sebagaimana yang diungkap oleh saudara Arvin (17) peserta didik-SMA:

“Dengan cara selalu melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan.”

Hal yang senada juga diungkap oleh Irfan (23) peserta didik-Mahasiswa:

“Melaksanakan aturan PPKM Darurat yang pertama tentu saja menetapkan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, memakai masker dan juga menjaga jarak. Namun di samping dari melakukan itu semua, harus juga ada suplemen vitamin dan sebagainya.”

Masyarakat Waru melaksanakan aturan PPKM Darurat dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi mobilitas). Dalam pandangan masyarakat melaksanakan aturan PPKM, masyarakat memberi tanggapan yaitu setuju dan mematuhi aturan dengan baik.

3. Persepsi masyarakat Desa Kureksari terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo

Persepsi masyarakat terhadap aturan PPKM Darurat memberi pendapat dengan respon yang berbeda. Sebagian besar masyarakat terhadap aturan PPKM setuju karena untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 salah satunya dengan cara mengurangi aktivitas di luar (Roziyanto, 2021).

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Arvin (17) Peserta didik masyarakat Desa Kureksari berpendapat :

“Setuju, karena dapat mengurangi adanya aktivitas luar ruangan yang dapat menyebabkan penularan virus”

Pendapat yang sama juga diberikan oleh bapak Hanif (25) selaku Guru masyarakat Desa Kureksari berpendapat :

“Setuju, karena di masa pandemi ini tingkat kenaikan orang terkena virus Covid semakin meningkat”

Disisi lain, masyarakat kurang setuju dan menganggap hal sepele. Dikarenakan tergantung dari situasi kondisi perekonomian masing-masing orang, meskipun aturan PPKM Darurat mengakibatkan dampak bagi semua masyarakat terutama kalangan menengah-bawah.

Dari hasil wawancara kepada informan, Jawaban yang diungkap oleh bapak Udin (43) pekerja masyarakat Desa Kureksari memberikan penjelasan:

“Menurut saya pribadi, sangat tidak setuju. Intinya tidak setuju”

Pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Pekerja-Pak Suparman (43) sebagai pedagang masyarakat Desa Kureksari:

“ Tidak setuju mas, karena itu dampaknya kemasyarakat. Mau apa-apa dibatasi”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Persepsi Masyarakat Desa Kureksari terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo, serta mengacu rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pemerintah Kecamatan Waru, Sidoarjo telah mengimplementasikan aturan PPKM salah satunya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat baik di tempat umum maupun perkumpulan-perkumpulan. Pemerintah desa terkait dengan Covid-19 ini, menegaskan kembali pada masyarakat agar lebih hati-hati untuk terkait masalah berkerumun, menjaga jarak, menggunakan masker.
- 2 Masyarakat Waru melaksanakan aturan PPKM Darurat dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi mobilitas). Dalam pandangan masyarakat melaksanakan aturan PPKM, masyarakat memberi tanggapan yaitu setuju dan mematuhi aturan dengan baik bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu cara untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia terutama di Kecamatan Waru. Meskipun, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Mereka enggan dan menganggap sepele dalam menerapkan aturan PPKM.
- 3 Persepsi masyarakat Desa Kureksari terhadap kebijakan PPKM Darurat di Kecamatan Waru Sidoarjo berdampak terhadap berbagai hal, salah satunya kondisi perekonomian dan dunia

pendidikan, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terhambat antara lain kebutuhan terbatas, pemasukan berkurang dan pembelajaran sekolah kurang efektif dikarenakan semua dibatasi serta memaksa melakukan aktivitas dengan cara online. Meski demikian, semua kalangan masyarakat merasakan dampak akibat wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengubah pola pikir perilaku masyarakat dengan menyesuaikan situasi kondisi. Pada aturan yang telah diberlakukan, masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan selalu waspada terhadap orang sekitar guna menghindari kontak fisik secara langsung dikarenakan berkerumun termasuk melanggar aturan dari pemerintah. Persepsi masyarakat Desa Kureksari menanggapi sebagian besar setuju dan menerima dengan baik. Terdapat pula menanggapi sebagian kecil tidak setuju dan menerima dengan terpaksa karena berbagai alasan yang berbeda.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan harus tetap memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dalam menerapkan aturan PPKM agar masyarakat tetap terjaga dan terhindar dari wabah Covid-19. Selain itu, pemerintah juga berhak memberikan teguran dan sanksi jika terdapat masyarakat yang tidak patuh pada aturan. Pada saat jam malam petugas diharap rutin keliling mengamati masyarakat untuk memastikan sudah di dalam rumah.
2. Masyarakat desa dihimbau untuk selalu mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Supaya angka kasus tingginya yang terpapar virus dapat melandai. Tentunya semua masyarakat menginginkan wabah pandemi ini berakhir. Oleh sebab itu, masyarakat harus ikut berpartisipasi mematuhi aturan PPKM. Disiplin dan patuh merupakan kunci keberhasilan dalam upaya membantu pemerintah dan memutus rantai penyebaran Covid - 19

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yusniar dan Nur Hakim Akhirani Nasunution. 2020. "Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19". Dalam Jurnal: LPPM UGN, Vol 10 (4).
- Karniawan, Tito Muhammad. 2021. "Inmendagri no 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat". Dalam Media Regulasi, 2 Juli 2021. Jakarta.
- Nawangsari, Rining Ertien, Ardha Wildan dkk. 2021. "Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo terhadap PPKM". Dalam Jurnal: Syntax Transformation, Vol 2 (5): 289-303.

- Nurfurqo, Ardika. 2020. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi. Dalam Jurnal: Yustika, Vol 23 (1): 13-23.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Pujaningsih, Nyoman Ni dan I.G.A.A.G Dewi Sucitawathi P. 2020. "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar". Dalam Jurnal: Moderat, Vol 6 (3).
- Rozianto, Fatkhur Candra, 2021. Persepsi Warga terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Wiyung. Surabaya: Skripsi.
- Yulianto, Diyan. 2021. Covid-19 Update: New Normal, Vaksinasi dan Fakta-fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui. Yogyakarta: Arruzz Media